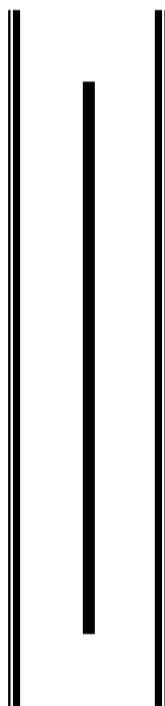




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**( LAKIP )**

DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2022



**Sekretariat :**  
**Jl. Prof. M. Yamin No. 57 Selong**  
**Kabupaten Lombok Timur**

## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan perubahan system pemerintahan yang mengikuti perkembangan paradigma yang berkembang di masyarakat, mengharuskan suatu pemerintahan dijalankan dengan baik (Good Governance) yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka itu sebagai wujud pertanggung jawaban publik, gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah perlu diaktualisasi dalam bentuk pelaporan yang transparan dan obyektif.

Pertumbuhan dan perkembangan untuk Sektor Industri, potensi Sumber Daya Alam (SDA) berupa produksi dari sektor pertanian dan sektor kehutanan yang terdiri dari hasil pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hasil hutan yang banyak menghasilkan berbagai bahan mentah sebagai kebutuhan bahan baku/bahan penolong bagi industri, sehingga diharapkan mampu menambah nilai jual dan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar dalam rangka peningkatan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi serta nilai produksi. Demikian juga dengan sektor perdagangan, diharapkan mampu meningkatkan sarana dan prasarana pasar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur serta tingkat kesadaran masyarakat dalam rangka pengamanan dan perlindungan konsumen melalui kegiatan pelayanan kemetrologian dan dengan adanya peningkatan sektor industri dan perdagangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Lombok Timur.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan sektor Perindustrian dan Perdagangan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Apalagi mengingat luas wilayah Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 254 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk  $\pm$  1,2 juta, sementara tingkat profesionalisme sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memadai sehingga hal tersebut menjadi problema dan persoalan yang cukup signifikan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka memenuhi hajat orang banyak. Adapun secara umum diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka memenuhi hajat orang banyak/masyarakat antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas hasil produksi unit UKM dan usaha perdagangan di Kabupaten Lombok Timur sehingga belum bisa bersaing di tingkat Nasional.
3. Sarana dan prasarana pasar di Kabupaten Lombok Timur belum memadai, sehingga masih banyak para pedagang yang belum tertampung di pasar.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamanan dan perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang beredar.

## 1.2 Dasar Hukum

Tuntutan reformasi dalam era global, membutuhkan adanya suatu komitmen yang kuat bagi organisasi dalam hal ini instansi pemerintah untuk mampu menjabarkan tuntutan tersebut, kemudian di implementasikan dalam suatu perencanaan yang matang dengan intelektualitas yang handal dan terukur. Reformasi kewenangan pemerintah sejalan dengan diterapkannya Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan perubahan mendasar yang mengharuskan semua organisasi pemerintah perlu mengetahui dimana organisasi itu sekarang, bagaimana mencapai tujuan dan bagaimana mengukur kemajuan yang berhasil dicapai. Selain itu juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023

## 1.3 Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Lombok dengan letak astronomis antara 116°-117° Bu-9°Lintang Selatan, dengan batas wilayah: Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah;Sebelah Timur: Selat Alas;Sebelah Utara: Laut Jawa;Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km<sup>2</sup> terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km<sup>2</sup> (59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km<sup>2</sup> (40,09 persen). Luas daratan Kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88 persen dari luas Pulau Lombok atau 7,97 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dataran diLombok Timur meliputi pegunungan dan dataran rendah yang membentang sampai daerah pantai. Daerah pegunungan terdapat di wilayah bagian utara yakni kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan ketinggian puncak 3.726 meter dari permukaan. laut. Adapun di bagian tengah sampai selatan berupa dataran rendah. Kecamatan dengan wilayah (daratan) terluas yaitu Kecamatan Sembelia, Sembalun, dan Jerowaru. Ketiga kecamatan ini cukup luas karena terdapat di dalamnya area hutan negara. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Sukamulia, Sakra, dan Montong Gading

#### 1.4 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan sumber daya pembangunan yang sangat penting. Oleh karena itu, perkembangan kondisi penduduk juga merupakan indikator yang wajib diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Pada bab ini akan diberikan gambaran mengenai kondisi penduduk seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan penduduk, penduduk menurut kelompok umur, dan persebaran penduduk tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dari data hasil proyeksi penduduk, penduduk Lombok Timur pada tahun 2010 mencapai 1.109.253 jiwa dan mencapai 1.200.612 jiwa pada tahun 2019, tumbuh sebesar 0,75 persen dari tahun sebelumnya. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berturut-turut yaitu Kecamatan Masbagik, Aikmel dan Pringgabaya. Gabungan penduduk tiga kecamatan ini hampir setara dengan seperempat total penduduk Lombok Timur. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil berturut-turut yaitu Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Sukamulia). Dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, secara total perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan 641.278 jiwa dan laki-laki 559.334 jiwa.

#### 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan seluruh nilai tambah yang diciptakan dari berbagai aktifitas ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDB/PDRB tahun 2019 menggunakan tahun dasar baru (tahun dasar 2010 menggantikan tahun dasar 2000) dengan basis SNA 2008. Salah satu implikasi penggunaan SNA 2008 adalah perubahan nominal dan perubahan klasifikasi PDRB dari 9 sektor menjadi 17 kategori. PDRB atas dasar harga berlaku (ADH) Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 mencapai 20,31 Triliun rupiah. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 1,48 triliun dari keadaan tahun 2018 yang mencapai 18,83 triliun. Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB. Angka PDRB Lombok Timur menunjukkan bahwa kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi terbesar pembentukan PDRB. Pada tahun 2019, lebih dari seperempat (27,06 persen) PDRB Lombok Timur berasal dari kategori pertanian. Meskipun dari tahun ke tahun persentase ini semakin mengecil dengan pergerakan yang 'halus'. Secara umum menunjukkan secara perlahan kecenderungan usaha di sektor pertanian semakin berkurang. Selain itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADK) biasanya digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Laju Pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 mencapai 4,68 persen

## 1.6 Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup LAKIP Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mencakup Perencanaan, Penetapan Kinerja Tahun 2022, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2022, Langkah Antisipatif, Solusi dan Akuntabilitas Keuangan.

## 1.7. Gambaran Umum SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari 2 Kepala Sub Bagian dan 1 Sub Koordinator yaitu :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Koordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Sarana Distribusi
  - b. Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)
4. Bidang Kemetrologian, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Pelayanan Tera dan Tera Ulang
  - b. Sub Koordinator Bina SDM
  - c. Sub Koordinator Pengawasan
5. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Ekspor
  - b. Sub Koordinator Fasilitas Ekspor Impor
  - c. Sub Koordinator Bina Pelaku Ekspor Impor
6. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Pengendalian Barang Pokok
  - b. Sub Koordinator Pengendalian Barang Penting
  - c. Sub Koordinator Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting serta Barang yang diatur.

Jumlah personil ASN Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur per Desember 2022 berjumlah 33 orang terdiri dari :

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 4 Orang
3. Eselon IV/Sub Koordinator : 14 Orang
4. Staf : 14 Orang.
5. Tenaga Honda : 62 Orang

Jumlah menurut Golongan terdiri dari :

1. Golongan IV : 6 Orang
2. Golongan III : 20 Orang
3. Golongan II : 7 Orang
4. Tenaga Honda : 62 Orang

Jumlah menurut pendidikan terdiri dari :

1. S2 : 3 Orang
2. S1 : 21 Orang
3. D3 : 1 Orang
4. SLTA : 7Orang
5. SLTP : 1 orang

Dari sejumlah aparatur tersebut di atas, untuk S1 dan S2 mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda antara lain :

1. Magister Manajemen : 2 Orang
2. Magister Pendidikan : 1 Orang
3. Sarjana Ilmu Pemerintahan : 1 orang
4. Sarjana Teknik Sipil : 1 Orang
5. Sarjana Pertanian : 2 Orang
6. Sarjana Ekonomi : 8 Orang
7. Sarjana Sosial : 1 Orang
8. Sarjana Admnistrasi Publik : 4 Orang
9. Sarjana Hukum : 3 Orang
10. Sarjana Matematika : 1 Orang

### **Kelengkapan**

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan per Desember 2022 memiliki kelengkapan berupa sarana dan prasana antara lain :

1. Kendaraan Roda 4 : 7 buah
2. Kendaraan Roda 2 : 5 buah
3. Komputer : 11 Unit

4. Laptop : 14 Unit

6. Dan lain-lain

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrologian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrologian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrologian pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
  - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrologian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B A B I I

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RPJMD

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Selaras dengan perubahan paradigma dalam kegiatan pembangunan yang perlu mengakomodasikan perubahan dalam masyarakat, mendorong terciptanya pemerintahan yang baik ( Good Governance ), memperbaiki kinerja sektor publik dalam rangka membudayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta dengan semakin besarnya tantangan sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi, maka penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi ( Renstra ) merupakan suatu langkah yang sangat penting.

Visi adalah gambaran tentang keadaan/sosok masa depan yang lebih baik dan bersifat menantang. Dan hal tersebut tetap mengacu pada visi Kabupaten Lombok Timur yaitu Visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

**“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”**

#### Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan sebagai berikut :

- Misi 3 : Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.



## B. Rencana Strategis OPD

### Tujuan dan Sasaran OPD

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu mengacu pada misi yang ketiga.

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan yang mengacu pada Misi Ketiga yaitu

#### T u j u a n :

- ✓ Mewujudkan kestabilan harga barang pokok dan barang penting

#### S a s a r a n :

- ✓ Stabilnya harga barang pokok dan barang penting

## C. Penetapan Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu stabilnya harga barang pokok dan barang penting.

TABEL. 1. Indikator Keinerja Utama (IKU)

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	target	Formula	Penjelasan	Sumber Data
1.	Mewujudkan kestabilan harga barang pokok dan barang penting	Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah)	rupiah	10.555	$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$ $Y^* = \frac{Y}{IHK}$ <p>Y**=Pengeluaran perkapita yang disesuaikan            Y* = Pengeluaran Perkapita harga konstan            Y = Pengeluaran Perkapita setahun            IHK = Indek Harga Konsumen</p>	Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.	Data BPS

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	target	Formula	Penjelasan	Sumber Data
1.	Stabilnya harga barang pokok dan barang penting	Fluktuasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	5,25	$\frac{\text{Rata-rata harga barang pokok tahun } n - \text{rata-rata harga barang pokok tahun } n-1}{\text{rata rata harga barang pokok tahun } n-1} \times 100\%$	Terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok menjadi permasalahan yang terus membebani masyarakat. Kondisi perekonomian yang cenderung belum stabil membuat harga-harga komoditas yang menjadi kebutuhan primer masyarakat terus mengalami naik-turun. Hampir dalam kesehariannya, semua negara berkembang di dunia mengalami fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi harga ini kadang bisa terjadi normal dalam ruang lingkup harian, atau kadang juga bisa sangat tidak normal melebihi batas estimasi dalam waktu yang lama.	Laporan Perkembangan Harga Barang

#### D. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022

Tabel. 2. Perjanjian Kinerja Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Stabilnya harga barang pokok dan barang penting	Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting	5,25

Dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada tahun anggaran 2021 telah menyusun Rencana kinerja dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jenis kegiatan :
1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Admnistrasi keuangan perangkat daerah
  3. Admnistrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  4. Admnistrasi kepegawaian perangkat daerah
  5. Admnistrasi umum perangkat daerah
  6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- B. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan jenis kegiatan :
1. Penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko/Swalayan
  2. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan
  3. Penerbitan Surat Keterangan Asal.
- C. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan jenis kegiatan :
1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- D. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jenis kegiatan :
1. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.
  2. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota
- E. Program Pengembangan Ekspor dengan jenis kegiatan :
1. Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- F. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan jenis kegiatan :
1. Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- G. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan jenis kegiatan :
1. Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi, misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada Indikator Kinerja & Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini ada 4 aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Realisasi Pelaksanaan Kinerja Kegiatan (PKK)
4. Pencapaian Realisasi Keuangan
5. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 90 - 100 = Amat Baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 50 = Kurang

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Tabel. 3. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

No.	Indikator tujuan	Target 2022		Realisasi 2022		%
1	2	3		4		5
1	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	10.555	Rupiah	9.631	Rupiah	91,24

No.	Indikator sasaran	Target 2022		Realisasi 2022		%
1	2	3		4		5
1	Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting	5,25	%	9,14	%	57,43

## 2. Perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel. 4. Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2020

No.	Indikator tujuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Realisasi 2022	% realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	9.855	9.409	10.555	9.631	102,3

No.	Indikator sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Realisasi 2022	% realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting	4,5	5,95	5,25	9,14	65,09

Tabel. 5. Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021

No.	Indikator tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realiasi 2022	% realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	10.205	9.450	10.555	9.631	101,9

No.	Indikator sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realiasi 2022	% realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting	5,5	11,12	5,25	9,14	121,6

### 3. Perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2023

Tabel . 6. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target kinerja 2023

No.	Indikator tujuan	Target 2023		Realisasi 2022		%
1	2	3		4		5
1	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	10.905	Rupiah	9.631	Rupiah	88,31

No.	Indikator sasaran	Target tahun 2023		Realisasi tahun 2022		%
1	2	3		4		5
1	Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting	5,00	%	9,14	%	54,70

- Capaian indikator tujuan OPD pada tahun 2022 yaitu pendapatan perkapita sebesar Rp. 9.631.000,- atau sebesar 91,24 % dibanding dengan target tahun 2022 sebesar Rp. 10.555.000,- secara umum dapat dinilai amat baik, akan tetapi dibandingkan dengan target akhir tahun 2023, nilai baik atau sebesar 88,31 %.
- Berdasarkan Matriks Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dilihat dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 57,43 %. Dengan demikian secara umum semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan nilai cukup
- Berdasarkan aspek keuangan sebagaimana pada lampiran, secara umum realisasi pencapaian keuangan rata-rata mencapai 93,66 %, hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur berhasil mencapai target program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Capaian target kinerja apabila dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan target akhir renstra tahun 2023 mencapai 54,70 % dengan nilai cukup, dengan menilai hasil capaian ini dibandingkan dengan target akhir tahun perlu untuk meningkatkan lagi kinerja untuk tahun berikutnya sehingga capaian kinerja menjadi lebih baik.

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis pengukuran kinerja kegiatan merupakan alat untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada masing-masing bidang/kelompok kinerja pada tahun 2022

Untuk Urusan Perdagangan target yang ingin dicapai adalah indikator tujuan yaitu pengeluaran perkapita, indikator sasaran yaitu fluktuasi harga barang pokok dan barang penting. Pada tahun 2022 target yang harus dicapai dan solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. Tujuan yang ingin dicapai adalah pengeluaran perkapita untuk tahun 2022, target Rp. 10.555.000,- dan realisasi Rp. 9.631.000,- atau capaian sebesar 91,24 %

Pencapaian target dari tujuan OPD mengalami penurunan disebabkan karena prediksi covid 19 yang masih berlanjut di tahun 2022. Pemerintah masih melaksanakan PPKM sehingga menutup hampir semua akses ekonomi akibatnya banyak lapangan kerja khususnya lapangan kerja non formal sehingga berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat secara umum dan ramalan resesi global yang ditandai dengan inflasi dan menurunnya nilai mata uang rupiah dibandingkan dollar Amerika. Sedangkan kenaikan realisasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dikarenakan tahun 2022 diberlakukan akhir PPKM dan juga banyak obyek wisata yang dibuka salah satunya Sirkuit Mandalika yang berimbas ramainya kunjungan wisata, banyak akses ekonomi seperti Mall, rumah makan, Hotel, tempat wisata dibuka untuk umum, dan PPKM mulai dilonggarkan, sehingga banyak lapangan kerja non formal mulai aktif seperti semula dan masyarakat sudah beraktifitas secara normal.

- b. Sasaran yang ingin dicapai adalah fluktuasi harga barang pokok dan barang penting untuk tahun 2022, target 5,25 % realisasi 9,14 % atau capaian sebesar 57,43 %.

Faktor penyebab tidak terlampaui target pada point 1 di atas adalah Fluktuasi harga mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,14 %, dimana hal ini disebabkan kenaikan harga rata2 pertahun tiga komoditi yaitu kedelai sebesar 21,05 %, bawang merah sebesar 26,10 % dan minyak goreng curah sebesar 15,54 %. Kenaikan komoditi kedelai dan bawang merah karena kondisi cuaca dan hambatan logistik, sedangkan untuk minyak goreng curah mengalami kenaikan

harga CPO karena produksi CPO menurun. Adapun usaha untuk mengantisipasi belum maksimal dilakukan karena pelaksanaan pasar murah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan juga bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur dan pelaksanaan pasar murah khusus komoditi beras dalam mengantisipasi dampak inflasi yang dilaksanakan di 21 Kecamatan dengan jumlah paket sebanyak 7.217 paket.

c. Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Peningkatan SDM kemetrolgian, dimana ada tambahan 1 (satu) orang tenaga penera untuk mendukung kelancaran kegiatan kemetrolgian.
2. Adanya kegiatan pasar murah baik dilakukan oleh Dinas Perdagangan, maupun kerjasama dengan pihak terkait lainnya yaitu Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Dekranasda Kabupaten Lombok Timur.
3. Adanya bantuan kepada masyarakat berupa sarana perdagangan (tenda dagang) serta bantuan sembako dari dana Pokir DPRD Kabupaten Lombok Timur yang cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, dimana kondisi pandemi covid 19 yang masih terjadi sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
4. Adanya dukungan dana/anggaran yang cukup memadai (khususnya pasar) yaitu untuk pengelolaan pasar serta pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana pasar sehingga dengan adanya pembangunan tersebut sangat berdampak terhadap daya tampung pasar (para pedagang yang belum mendapat tempat dapat tertampung di los-los pasar), serta ada usaha untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengamanan dan perlindungan konsumen melalui kegiatan Pelayanan Kemetrolgian melalui kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP serta kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang penting Metrologi Legal di Kabupaten Lombok Timur.
5. Adanya kerja sama yang baik dengan semua pihak terkait dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan

**5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur sebagaimana pada Bab 1 di atas jika dibandingkan dengan jumlah personil yang ada pada Dinas Perindag per 31 Desember 2022 sebanyak 33 orang ASN, sehingga hal tersebut



menyebabkan capaian indikator kinerja belum dapat dicapai secara maksimal, hal ini terlihat yaitu :

Jumlah pegawai/personil sebanyak 33 orang PNS , yang terdiri dari Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi sebanyak 4 orang PNS , dimana tugas dan tanggung jawab cukup berat dimana tugasnya antara lain memfasilitasi pengelolaan pasar yang ada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 38 unit pasar, Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting sebanyak 5 orang PNS yang juga akan memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah Kabupaten Lombok Timur setiap minggu di beberapa lokasi pasar rakyat dan Bidang Metrologi sebanyak 8 orang PNS yang menangani sebanyak 11.028 alat UTTP yang wajib untuk dilakukan tera dan tera ulang di 21 Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur. Hal tersebut yang menjadi salah satu hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. Hal tersebut terlihat pada perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, dimana untuk fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting target sebesar 5,25 % dimana realisasi mencapai 9,14 % atau sebesar 57,43%

Demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Bidang Perdagangan, seperti kendaraan roda 4 yang kondisinya kurang layak pakai. Hal tersebut juga perlu mendapat perhatian sehingga beban pekerjaan dapat berkurang.

#### **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran sebagaimana Surat Pernyataan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Dinas Perdagangan dengan Bupati Lombok Timur, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada tahun anggaran 2022 telah menyusun Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

#### **➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, dengan jenis kegiatan :**
- Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
  - Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang
  - Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, dengan jenis kegiatan :**
- Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING dengan jenis kegiatan :**
- Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten
  - Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, dengan jenis kegiatan :**
- Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN dengan jenis kegiatan :**
- Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan pada tahun 2022 sangat mendukung keberhasilan sasaran yang telah ditargetkan/yang ingin dicapai Dinas Perdagangan sehingga dengan program/kegiatan tersebut target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Bidang Perdagangan, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain dimana mulai tahun 2022 Dinas Perdagangan diberi kewenangan dalam pengelolaan Pasar yang sebelumnya pengelolaan pasar menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah, sehingga semua kegiatan pengelolaan pasar termasuk penarikan retribusi dari pelayanan pasar diberikan kepada Dinas Perdagangan. Kegiatan Kemetrolagian telah dilaksanakan tera dan tera ulang di seluruh kecamatan Se Kabupaten Lombok Timur dan juga pelaksanaan pengawasan terhadap Alat UTTP terutama SPBU/SPBN dan Timbangan Jembatan.

Dari target sasaran yang ingin dicapai yaitu fluktuasi harga barang pokok dan barang penting belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu realisasi 9,14 % atau capaian sebesar 57,43 % hal ini terjadi disebabkan fluktuasi harga mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,14 %, dimana hal ini disebabkan kenaikan harga rata-rata pertahun tiga komoditi yaitu kedelai sebesar 21,05 %, bawang merah sebesar 26,10 % dan minyak goreng curah sebesar 15,54 %. Kenaikan komoditi kedelai dan bawang merah karena kondisi cuaca dan hambatan logistik, sedangkan untuk minyak goreng curah mengalami kenaikan harga CPO karena produksi CPO menurun. Adapun usaha untuk mengantisipasi belum maksimal dilakukan karena pelaksanaan pasar murah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan juga bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur dan pelaksanaan pasar murah khusus komoditi beras dalam mengantisipasi dampak inflasi yang dilaksanakan di 21 Kecamatan dengan jumlah paket sebanyak 7.217 paket. Selain itu juga perlu adanya koordinasi baik antara instansi terkait dengan stakeholder seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, BULOG serta para pengusaha sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik dalam mengantisipasi kenaikan dari harga barang pokok dan barang penting.

Kegiatan monitoring dan pemantauan harga barang pokok dan barang penting yang telah dilakukan, dari hasil pemantauan di beberapa pasar dan lokasi ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan yaitu cabe kecil yang pada tahun 2021 harga rata-

rata pertahun Rp. 51.300/kg, pada tahun 2022 harga rata-rata pertahun Rp. 46.300 /kg terjadi penurunan sebesar 9,75 % dari rata-rata tahun 2021 dan beras premium (II) rata rata tahun 2021 Rp. 9.300 / kg menjadi Rp. 9.000 / kg pada tahun 2022 atau terjadi penurunan sebesar 3,23 % hal ini disebabkan karena kondisi ketersediaan mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Selain itu juga telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan pasar murah baik yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan maupun bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur di beberapa lokasi, selain itu diusahakan untuk mengurangi pengiriman cabe keluar daerah, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan lokal di Lombok Timur. Selain itu juga telah dilaksanakan pasar murah khusus untuk komoditi beras sebagai dampak dari inflasi yang telah dilaksanakan di 21 Kecamatan se Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah paket sebanyak 7.217 paket dimana dijual dengan harga Rp. 50.000,- per paket (isi paket sebanyak 10 kg beras)

Untuk minyak goreng curah terjadi kenaikan yaitu rata-rata pertahun Rp. 14.800/liter tahun 2021, terjadi kenaikan pada tahun 2022 rata-rata pertahun sebesar Rp. 17.100/liter, ini terjadi kenaikan sebesar 15.54 %, ini terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia diakibatkan mengalami kenaikan harga CPO karena produksi CPO menurun.

Untuk komoditi lain seperti Bawang merah dan kedelai terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu bawang merah dari tahun 2021 Rp. 24.900 / kg menjadi Rp. 31.400/ kg tahun 2022 atau terjadi kenaikan sebesar 26,10 % dan kedelai dari tahun 2021 sebesar Rp. 13.300/ kg menjadi Rp. 16.100/kg tahun 2022 atau terjadi kenaikan sebesar 21,05 %.

Kegiatan Pengawasan ketersediaan (stock) pupuk bersubsidi dilakukan secara rutin baik melalui laporan penyaluran dari distributor pupuk bersubsidi maupun dengan melakukan monitoring langsung ke lapangan (distributor dan pengecer). Kegiatan monitoring tidak saja dilakukan oleh Dinas Perdagangan, tetapi juga dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pemerintah Daerah juga telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 melalui Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/359/TAN/2021 yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang beranggotakan OPD terkait serta Aparat Penegak Hukum. Dibentuknya KP3 bertujuan agar dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam penyaluran pupuk dan pestisida, termasuk pupuk bersubsidi. Permasalahan yang sering terjadi terutama menyangkut kelangkaan, harga tidak sesuai HET serta peredaran pupuk dan pestisida palsu.

Alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dan SP-36 sesuai dengan usulan kebutuhan berdasarkan e-RDCK, yaitu masing-masing sebesar 34.345 ton untuk urea dan 6.655 ton untuk SP-36. Realisasi untuk Urea sebesar 32,104 ton atau 93.48 % dan SP-36 sebesar 3.416 Ton atau 51.33 %. Sementara untuk jenis pupuk ZA dan NPK diberikan alokasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan usulan berdasarkan e-RDCK. Kebutuhan pupuk ZA sebesar 5.613 ton namun diberikan alokasi 2.680 ton atau hanya sebesar 47.75 %. Sementara kebutuhan pupuk NPK sebesar 43.409 ton diberikan alokasi sebesar 13.800 ton atau sebesar 31,79 %. Pupuk organik 88.638 Ton, realisasi sebesar 1.224 Ton atau 1.38 %.

Untuk jenis pupuk yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik tingkat provinsi maupun pusat agar dapat diberikan tambahan kuota pupuk bersubsidi.

Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi juga dilakukan terhadap distributor dan pengecer agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga dan tepat mutu yaitu dengan melakukan monitoring ke distributor pupuk di Kabupaten Lombok Timur; melakukan monitoring dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di tingkat kios pengecer pupuk bersubsidi dan ikut serta kegiatan sosialisasi dan penandatanganan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli ) antara Distributor dan kios penyalur pupuk bersubsidi.

Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain yaitu

1. Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan musim tanam sehingga pada saat pupuk bersubsidi dibutuhkan pupuk belum datang..
2. Jumlah pupuk bersubsidi yang di salurkan tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk oleh petani.
3. Harga pupuk non subsidi dianggap terlalu mahal oleh petani.
4. Masih ada petani yang tidak masuk dalam RDCK sehingga tidak bisa menerima pupuk subsidi.
5. Sejak 1 juli 2022 berkurangnya jenis pupuk yang bisa di subsidi menjadi 2 jenis yaitu urea dan NPK serta berkurangnya komoditi yang disubsidi hanya 9 komoditi yaitu padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, kakao, temu dan kopi.

Dalam mencari solusi terkait permasalahan tersebut di atas dilakukan beberapa hal antara lain dengan melakukan koordinasi ke Distributor agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu agar pupuk tetap tersedia disaat petani membutuhkan,

menyampaikan saran kepada Dinas terkait agar dalam mengajukan RDKK memasukkan atau melakukan pendataan kembali terhadap petani yang belum terdata di RDKK.

Untuk HET harga telur ayam ras yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 19.000 – Rp. 21.000,- per kg untuk pembelian ditingkat peternak dan Rp. 24.000,- untuk penjualan di konsumen, hasil pemantauan harga ditingkat pasar sampai dengan bulan Desember 2022 harga telur ayam ras rata-rata Rp. 1.800 per butir atau Rp, 27.000,- per kg, harga ini melebihi dengan HET yang telah ditetapkan.

Untuk perdagangan antar pulau dan ekspor di Kabupaten Lombok Timur terdapat beberapa komoditi antara lain Vanili yang di ekspor ke Amerika nilai ekspor Rp. 9.000.000.000,-, dan udang tambak diekspor ke Singapura dan Malaysia dengan nilai ekspor sebesar Rp. 18.000.000.000. Batu Apung dengan nilai ekspor Rp. 935.938.850, Kelapa dengan nilai ekspor Rp. 529.680.000. Adapun perdagangan antar pulau yaitu komoditi jagung, beras, cabai, lobster, kepiting, cengkeh, bawang merah, sayuran, sirip/kulit ikan hiu dan lain-lain dikirim ke Pulau Bali, Sumbawa dan Jawa. Nilai total perdagangan antar pulau sesuai dengan hasil pendataan sebesar Rp. 16.274.800.000,- Selain itu dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB, kegiatan Pasar Lelang Agro di Mataram yang telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, komoditi yang diikutsertakan dalam pasar lelang adalah produk pertanian, peternakan, perkebunan. Hasil pasar lelang yaitu beras dengan nilai perdagangan sebesar Rp. 800.000.000,-. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Pasar Lelang ini adalah untuk memfasilitasi UKM yang ada di NTB memasarkan produknya secara online bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Demikian juga untuk kegiatan lain yaitu Rehab Pasar Masbagik Lama (Pembuatan Pasar Kuliner) melalui APBD Kabupaten Lombok Timur TA. 2022 Selain itu juga Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mengajukan usulan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Perdagangan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Suela dan Pasar Rakyat Montong Beter melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022. Selain itu juga terdapat bantuan sembako dan tenda dagang sebanyak 9 unit yang bersumber dari Dana Pokir Dewan.

Pada tahun 2022 Dinas Perdagangan diberi kewenangan dalam pengelolaan Pasar termasuk penarikan retribusi dari pelayanan pasar, adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar, dimana pasar yang dikelola sebanyak 38 unit pasar yang mana masing-masing pasar ditunjuk seorang kepala pasar sebagai pengelola pasar, adapun jumlah potensi pedagang di los pasar, sewa tanah maupun toko/ruko sebanyak

11.781 orang. Dimana target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 15.242.019.190,- pada tahun 2022, adapun realisasinya sebesar Rp. 10.063,166.750, atau sebesar 66,02 %, ini masih dibawah target yang ditetapkan karena masih banyak tunggakan sewa toko/ruko serta Pandemi covid yang masih terjadi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang ditunjukkan dengan berkurangnya kunjungan masyarakat ke pasar. Selain itu telah dilaksanakan kerjasama dengan BNI untuk penarikan retribusi sewa toko di tiga pasar (Pasar Masbagik Baru, Aikmel, Pancor) melalui Tap Cash, dengan tujuan mengurangi penggunaan uang tunai, transaksi akan lebih cepat masuk ke rekening kas daerah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang teknologi digital serta mengurangi kebocoran setoran PAD. Dan juga beberapa kali telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan pasar untuk meningkatkan SDM pengelola Pasar bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI.

Untuk kegiatan Kemetrolgian, pelaksanaan tera dan tera ulang dilaksanakan di 21 Kecamatan dengan jumlah potensi alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) sebanyak 11.028 buah alat UTTP. Adapun target retribusi dari pelayanan tera dan tera ulang pada tahun 2022 sebanyak Rp. 105.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.486.855,- atau sebesar 61,42 %, angka ini memang jauh dari harapan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP, sementara kewajiban untuk melaksanakan tera dan tera ulang minimal 1 kali dalam setahun, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera ulang Alat-alat UTTP.
- Kurangnya sarana dan prasarana khusus kendaraan operasional dimana potensi alat UTTP yang cukup banyak dan cukup luasnya lokasi tempat pelaksanaan tera dan tera ulang dari 254 Desa/Kelurahan hanya 71 Lokasi yang terlayani.
- Jumlah Tenaga Tera (Pegawai Berhak) yang berjumlah 3 orang tidak sebanding dengan luas wilayah jangkauan pelaksanaan tera dan tera ulang.
- Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada pemilik UTTP yang ada di wilayah Lombok Timur.
- Kegiatan pengawasan yang juga masih kurang, masih terbatas pada pengawasan perusahaan besar seperti SPBU/SPBN dan Timbangan Jembatan.
- Kegiatan pendataan yang masih belum maksimal.

Upaya yang akan dilakukan antara lain :

- Melaksanakan sosialisasi /penyuluhan kepada pemilik alat UTTP secara intensif dengan bekerjasama dengan pihak terkait, seperti kecamatan, desa dan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Membuat rencana potensi PAD pada tahun yang akan datang dengan mengacu pada potensi tahun 2022.
- Menambah tenaga ahli / SDM penera, pada tahun 2022 ada penambahan sebanyak 1 orang, sudah melaksanakan Diklat Kemetrolgian dan sudah melaksanakan ujian kompetensi untuk menjadi tenaga berhak /penera.
- Meningkatkan profesionalisme SDM penera melalui Bimtek/pelatihan bekerjasama dengan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan.
- Memasang spanduk/baliho sebagai informasi tentang pentingnya kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP di masing-masing Desa/Kelurahan dan di pasar-pasar.

## **B. Realisasi Anggaran**

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2022, Belanja operasi (belanja pegawai) sebesar Rp. 4.049.969.459,- ( Empat milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), realisasi sebesar Rp. 3.744.403.671,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 92.46 %. Sedangkan Belanja operasi (barang dan jasa) sebesar Rp. 15.411.013.640,- Realisasi sebesar Rp. 15.038.585.730,- atau 97,58 %. Belanja modal Rp. 1.247.504.000, realisasi Rp. 611.624.530,- atau sebesar 49,03 %

Total Belanja sebesar Rp. 20.708.487.099,- realisasi sebesar Rp. 19.394.613.931,- atau 93.66 %.

Dari jumlah anggaran yang tersedia pada Dinas Perdagangan pada tahun 2022, cukup memadai, khususnya pada Bidang Sarana Pelaku Distribusi. Akan tetapi pada bidang-bidang lain jumlah anggaran yang dibutuhkan belum maksimal sehingga dalam pencapaian program dan kegiatan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih sangat tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan, dan untuk lebih jelasnya laporan realisasi pada tahun 2022.

Kami berharap semoga ditahun yang akan datang jumlah anggaran yang diberikan oleh TAPD sesuai dengan hajat orang banyak/masyarakat, khususnya terkait dengan dana pembinaan kepada masyarakat.



Untuk lebih jelasnya realisasi Anggaran dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 7.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan**  
**Belanja Langsung Tahun 2022 dan**  
**Dibandingkan dengan Tahun 2021**

No	Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (2022) (Rp)	Selisih Lebih/ Kurang (Rp)	%
1.	Belanja operasi	<b>19.460.983.099</b>	<b>18.782.989.401</b>	<b>677.993.698</b>	<b>96,52</b>
	a. Belanja Pegawai	4.049.969.459	3.744.403.671	305.565.788	92,45
	b. Belanja Barang & Jasa	15.411.013.640	15.038.585.730	372.427.910	97,58
2.	Belanja Modal	1.247.504.000	611.624.530	635.879.470	49,03
	<b>Jumlah</b>	<b>20.708.487.099</b>	<b>19.394.613.931</b>	<b>1.313.873.168</b>	<b>93,66</b>
	Belanja Operasi Tahun 2021	<b>14.765.084.956</b>	<b>13.428.014.525</b>	<b>1.337.070.431</b>	<b>90,94</b>
	Lebih / Kurang	5.943.402.143	5.966.599.406	-23.197.263	100,39
	Belanja Modal Tahun 2021	<b>272.137.000</b>	<b>270.590.000</b>	<b>506.884.008</b>	98,92
	Lebih / Kurang	975.367.000	341.034.530	634.332.470	34,96
	<b>Jumlah Tahun 2021</b>	<b>15.037.221.9563</b>	<b>13.698.604.525</b>	<b>1.338.617.431</b>	<b>91,10</b>
	Lebih / Kurang	5.671.265.143)	5.696.009.406	-24.744.263	100,44

## **BAB IV P E N U T U P**

### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin.

Dengan memperhatikan paparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan amat baik. Pernyataan tersebut tentu didukung oleh :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Tujuan dicapai sebesar 91,24 %.
- b. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dicapai sebesar 57,43 %.
- c. Hasil Pengukuran Pencapaian Realisasi Keuangan dicapai rata-rata 93,66 %.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari kerja keras dan peran serta dunia usaha dengan didukung oleh instansi terkait bagi penumbuhan, pengembangan, dan peningkatan Sektor Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur.

### **B. Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja**

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam Tahun Anggaran 2022 secara umum juga menghadapi kendala dan kelemahan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan karena belum memadainya SDM yang tersedia.
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan UKM dan usaha perdagangan dibidang pemasaran, yang meliputi aspek mutu, kualitas produk, jaringan pemasaran serta masih kurangnya pemahaman tentang manfaat promosi/pameran sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran.
3. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen.

### C. Strategi Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala / hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan sektor Perdagangan, dimasa yang akan datang dapat meraih hasil yang lebih baik antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Dinas Perdagangan sesuai profesionalisme dan job yang ada.
- b. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang pemasaran UKM dan usaha perdagangan serta meningkatkan kualitas dan mutu UKM.
- c. Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya, terima kasih.

Selong, Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Lombok Timur

